

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Dalam suatu negara, pembangunan bertujuan mewujudkan hidup yang lebih baik dari sebelumnya untuk kesejahteraan bersama. Karena itu baik atau tidaknya suatu pembangunan tidak dilihat dari segi fisiknya namun juga harus diimbangi segi nonfisik, diantaranya sejauh mana usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial sangat penting untuk dievaluasi karena hal ini sangat berpengaruh terhadap ekonomi dan stabilitas suatu pemerintah. Dampak yang ditimbulkan oleh kurangnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan sosial adalah melemahkan ketahanan sosial masyarakat.

Permasalahan kesejahteraan sosial ini memang tidak akan seluruhnya dapat diatasi namun hal ini harus dapat ditekan serendah mungkin dan pemerintah menanganinya dengan serius untuk mewujudkan pembangunan yang merata ke segala lapisan masyarakat. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial diantaranya melalui perbaikan sarana sosial.

Seperti program rehabilitasi perawatan kesehatan panti jompo, penyediaan sarana untuk orang cacat, bimbingan dan latihan keterampilan. Orang dapat dipulihkan kesihatannya, dibuat mampu untuk mengatasi kekecewaan emosinya, atau dilatih untuk mampu mengerjakan pekerjaan yang menghasilkan. Banyak orang miskin dapat memetik manfaat dari program rehabilitasi semacam itu, dan banyak orang yang dapat dihindarkan dari kemiskinan dari program sejenis itu.

Seiring dengan upaya itu, terdapat pula usaha penciptaan lingkungan masyarakat sebagai tempat yang memudahkan bagi para penyandang cacat tubuh.<sup>1</sup>

Dinas Sosial adalah kelembagaan pemerintah yang melaksanakan tugas umum pemerintah daerah di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tugas dinas di bidang sosial khususnya rehabilitasi sosial PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial)

Di kota Bandung juga ada dinas sosial dan penanggulangan kemiskinan yang di bentuk pada tahun 2017. Berdasarkan PERDA (peraturan daerah) Kota Bandung no. 8 tahun 2016. Selain itu juga dibentuk berdasarkan peraturan walikota Bandung no. 1383 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja dinas sosial dan penanggulangan kemiskinan kota Bandung.

Dalam susunan struktur organisasi dinas sosial tersebut ada Divisi kerja UPT Pusat Kesejahteraan Sosial yang dibentuk untuk memudahkan warga miskin dan rentan miskin di daerah terkait untuk menjangkau layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dikelola oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa/kelurahan dan swasta/CSR. Dimana pemerintah atau dinas sosial diharapkan menyediakan kontribusi aturan dan anggaran untuk pelaksanaan puskesmas.

Dalam UPT PUSKESOS Kota Bandung ini ada pekerja sosial yang berjumlah 7 (tujuh) orang, mereka bertugas memberikan pelayanan dan

---

<sup>1</sup> Horton dan hunt, Sosiologi (Jakarta : Erlangga, 1984). Hal. 53.

rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk, motivasi dan diagnosa psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, serta bimbingan lainnya yang dimaksud memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar bagi PMKS.

Pekerja sosial sendiri adalah seseorang yang melakukan pertolongan kepada orang yang mengalami disfungsi sosial dengan disertai kemampuan khusus dibidang ilmu pengetahuan, kemampuan dan nilai agar dapat kembali berfungsi secara sosial. Beragam praktek telah dilakukan oleh pekerja sosial di Indonesia termasuk yang dilakukan di Dinas Sosial Kota Bandung.

Di Kota Bandung sendiri ada 23 jenis PMKS yang di antaranya dikelompokkan menjadi: (1) kemiskinan, (2) keterlantaran, (3) disabilitas, (4) ketunaan sosial dan penyimpangan prilaku, (5) korban bencana, (6) keterasingan, serta (7) korban tindak kekerasan, marjinal, perdagangan orang, eksploitasi dan diskriminasi.

menurut kepala UPT PUSKESOS Kota Bandung bapak Handian. SS., MTHM. yang saya wawancari jenis PMKS tersebut bisa bertambah seiring dengan berjalannya waktu dan modernitas akan muncul jenis PMKS baru dilingkungan masyarakat. Kemajuan teknologi juga berpengaruh terhadap terhadap munculnya jenis PMKS baru seperti yang beliau tuturkan misalnya anak kecil yang lebih suka bermain gadget (hand phone) dan main game play station,

bermain ke warnet ketimbang bersosialisai dengan keluarga atau orang-orang dilingkungan sekitar. Hal ini akan menimbulkan disfungsi sosial yang memungkinkan munculnya jenis PMKS baru.

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan kepada PMKS sewaktu pkl menjadi asisten pekerja sosial yang secara langsung dan ikut serta dalam segala hal kegiatan yang dilakukan oleh pekerja sosial pada senin, 2 Juli 2018 di dinas sosial kota Bandung, pada saat itu ada 4 orang PMKS diantaranya anak jalanan dan pengemis yang saya wawancarai satu persatu alasan mereka turun ke jalanan karena faktor ekonomi walaupun mereka mengakui mempunyai kerjaan sebagai serabutan karena hanya tamatan sekolah SD/SMP pendapatan dari seorang serabutan atau pekerja panggilan tidak menentu dan tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok sehari-hari.

Semua program-program yang dilakukan oleh dinas sosial untuk mensejahterakan PMKS tidak semuanya bisa diterima dan berhasil diterapkan oleh PMKS itu sendiri. Dengan alasan faktor ekonomi kebanyakan PMKS yang telah terkena razia terus di rehabilitasi sosial, diberi motivasi, pelatihan dan pembinaan kewirausahaan serta kegiatan pembinaan lainnya yang dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan mereka. Memberikan pengalaman baru atau keahlian untuk memulai usaha sendiri agar dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar tetapi mereka terjun kembali ke jalanan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian tentang program kerja dinas sosial, kegiatan yang dilakukan dinas sosial, dan solusi yang sudah dilakukan oleh dinas sosial untuk memotivasi dan mensejahterakan PMKS, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut, dan mengangkatnya dalam judul: “Kontribusi Pekerja Sosial Dalam Meningkatkan Motivasi Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)” (Penelitian Di Panti Rehabilitasi UPT PUSKESOS Dinas Sosial Kota Bandung).

## **1.2. Identifikasi masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diidentifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :

- 1.2.1. Program kerja yang dilakukan pekerja sosial kurang maksimal untuk PMKS
- 1.2.2. PMKS yang keluar masuk rehabilitasi dinas sosial kota Bandung
- 1.2.3. Sarana dan prasarana yang kurang mendukung kegiatan untuk mengatasi masalah PMKS di dinas sosial kota Bandung.

## **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Identifikasi Masalah tersebut, maka rumusan masalahnya dapat diketahui adalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Apa program panti rehabilitasi PMKS dalam mengatasi masalah PMKS di kota Bandung?

1.3.2. Apa program para pekerja sosial yang dilakukan di panti rehabilitasi PMKS Dinas Sosial Kota Bandung untuk Para PMKS?

1.3.3. Apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam proses rehabilitasi PMKS oleh pekerja sosial di dinas sosial kota Bandung?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulisannya adalah sebagai berikut:

- 1.4.1. untuk mengetahui program yang dilakukan pekerja sosial dalam mengatasi PMKS di dinas sosial kota Bandung.
- 1.4.2. untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan selama di rehabilitasi dalam membina dan memotivasi PMKS di dinas sosial kota Bandung.
- 1.4.3. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat dalam proses rehabilitasi PMKS di dinas sosial kota Bandung.

#### **1.5. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian yang dilakukan penulis diharapkan mempunyai 2 (dua) kegunaan utama, yaitu (1) Kegunaan Praktis dan (2) Kegunaan Akademis.

##### **1.5.1. Kegunaan Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi atau dapat dikembangkan lebih lanjut khususnya bagi permasalahan yang ada saat ini di daerah kota Bandung bidang kesejahteraan sosial. Sebagai masukan juga untuk membangun dan meningkatkan efektifitas program yang ada di lembaga dinas sosial dan penanggulangan kemiskinan divisi kerja UPT Pusat Kesejahteraan

Sosial Kota Bandung, termasuk para pekerja yang ada di dalamnya serta pemerintah secara umum.

#### 1.5.2. Kegunaan Akademis

##### 1) Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai peran pekerja sosial dalam meningkatkan motivasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

##### 2) Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini mudah-mudahan dapat menjadi tambahan informasi dan menambah ilmu pengetahuan mengenai peran pekerja sosial dalam meningkatkan motivasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

##### 3) Bagi Pengembang Ilmu

Sebagai informasi khususnya mengenai peran pekerja sosial dalam meningkatkan motivasi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Serta penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan ilmu pengetahuan tentang peran pekerja sosial sehingga dapat lebih meningkatkan efektifitas kerja di lingkungan dinas sosial.

## 1.6. Kerangka Pemikiran

Lembaga sosial adalah sistem hubungan sosial atau tata kelakuan yang memiliki nilai-nilai, norma, serta prosedur tertentu guna untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat khususnya di bidang sosial. Salah satunya bidang sosial yang di bangun adalah Pusat Kesejahteraan Sosial yang ada dalam divisi kerja Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan. Lembaga ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan untuk menuju masyarakat yang bebas dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Pada pembahasan mengenai Dinas Sosial dan penanggulangan kemiskinan ini, maka penulis memfokuskan pada Pekerja Sosial (PekSos) yang ada pada satuan kerja Divisi UPT Pusat Kesejahteraan Sosial Kota Bandung yang tempatnya berlokasi di JL, Babakan Derwati Rancasari Kota Bandung. Pekerja Sosial ini berperan sebagai pemberdaya PMKS yang mempunyai tugas untuk Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial lingkup pemberdayaan PMKS.

Program-program yang dibuat Pekerja Sosial dirancang semaksimal mungkin supaya dapat mensejahterakan para PMKS dan mereka pun bisa merasakan peran dari Pekerja Sosial terhadap kehidupan Sosial Mereka supaya bisa hidup normal seperti masyarakat pada umumnya. Dan lebih termotivasi bagi para PMKS supaya ingin belajar dan keahlian untuk mendapatkan kerja yang layak juga agar mereka bisa diterima dimasyarakat dan bisa berinteraksi dengan baik dilingkungan setempat.

Peran sosial merupakan pola perilaku yang diharapkan (*expected behaviour*) yang berkaitan dengan status atau kedudukan sosial seseorang dalam suatu kelompok atau situasi sosial. Konsep ini dapat dijelaskan lagi dengan melihat masyarakat sebagai sistem interaksi sosial yang berdasarkan kepada saling harapan pelaku-pelakunya. aneka peran perlu dibedakan dari susunan peran (*role set*), suatu Peran sosial tidak terjadi secara sendirian. Suatu peran biasanya berkaitan dengan peran-peran lain yang saling melengkapi. Kelompok peran yang saling melengkapi ini dikenal sebagai susunan peran. Sebagai contoh, susunan peran seorang dokter terdiri dari pasien, perawat, bidan, pekerja sosial, dan sebagainya.<sup>2</sup>

Tata hubungan antara peran pekerja sosial dalam memotivasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terletak pada pola sikap dan interaksi pada keduanya yang berwujud peraturan serta kebijakan baik dari pihak lembaga yaitu Pekerja Sosial maupun dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sendiri. Hal itu dikenal dengan *Structural Fungsional* Talcot Person sebagai fungsi *Latency* (Pemeliharaan).

Fungsi pemeliharaan itu, berfungsi memelihara pola tata hubungan peran diantara lembaga (Pekerja Sosial) kepada PMKS dalam melindungi atau merawat PMKS tersebut dalam bentuk program-program yang dapat menjadikan para PMKS tersebut sejahtera dan bisa hidup serta berbaur sebagaimana masyarakat pada umumnya. Program-program dan aturan yang ada di Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Divisi Kerja UPT Pusat Kesejahteraan Sosial

---

<sup>2</sup> Taufiq Rahman, *Glosari teori Sosiologi*, (Bandung: Ibnu Sina Press, 2011), hal. 93-94.

tersebut merupakan sarana untuk mengatur hak dan kewajiban antara Dinas Sosial yang di dalamnya ada pekerja sosial dan PMKS yang terdapat di Dinas Tersebut.

Yang dimaksud fungsi disini diartikan sebagai segala kegiatan yang diarahkan kepada memenuhi kebutuhan atau kebutuhan kebutuhan dari sebuah sistem.<sup>3</sup> Fungsi ini menurut Talcott parson dibutuhkan oleh semua sistem secara bersama-sama untuk bisa bertahan dan demi keberlangsungan hidupnya, fungsi ini bagian dari unit analisis Talcott parson yang disebutnya dengan AGIL. AGIL adalah singkatan dari Adaptation (A). Goal Attainment (G), Intergratioan (I), dan Latency (Pattern maintenance) (L).

Setiap entitas relatif subsitem-diri terkait lingkungan yang memenuhi syarat sebagai sebuah sistem sosial.<sup>4</sup> Kerangka fikir AGIL ini relevan dengan organisasi-organisasi di dalam misalnya Dinas Sosial Dan penanggulangan Kemiskinan ini adapun dari fungsi-fungsi dari AGIL tersebut, yakni:

*Pertama, Adaptation* yaitu fungsi yang dimiliki oleh semua sistem untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan dari sistem tersebut. contoh konkritnya adalah mengenai peraturan Dinas Sosial atau dari pekerja sosial dan respon PMKS. Dinas sosial ataupun UPT Pusat Kesejahteraan Sosial harus menyeimbangkan atau mengedaptasikan peraturan yang dibuat dengan keadaan PMKS dan para PMKS juga harus beradaptasi dengan peraturan-peraturan dari dinas atau UPT Pusat Kesejahteraan Sosial demi tercapainya

---

<sup>3</sup> Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), hal. 53.

<sup>4</sup> George Ritzer, *Edisi kedelapan Teori Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal. 302.

kelangsungan hidup mereka. Jika keduanya saling beradaptasi satu sama lain, maka akan memunculkan keseimbangan.

*Kedua, Goal Attainment* yaitu fungsi yang dimiliki oleh sebuah sistem untuk dapat mendefinisikan dan mencapai tujuannya. Misalnya pada suatu lembaga yang menangani atau mengurus para PMKS dalam hal ini Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Divisi Kerja UPT Pusat Kesejahteraan Sosial. Jika dalam keduanya tidak dapat menentukan tujuannya sama maka tentunya Para PMKS atau pihak Dinas Sosial itu tidak akan dapat menjalankan fungsinya. Sebaliknya, jika keduanya memiliki tujuan yang sama yakni mencapai kesejahteraan, maka kemungkinan besar kesejahteraan itu akan tercapai.

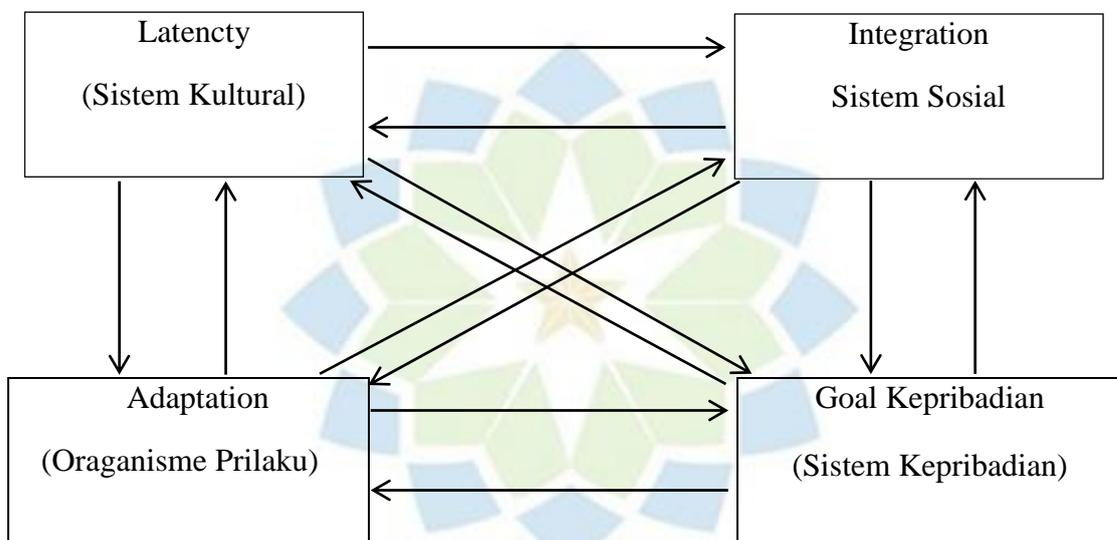
*Ketiga, Integration* yaitu fungsi yang dimiliki oleh sistem dalam rangka mengatur hubungan bagian-bagian dalam komponen sistem tersebut dan aktor-aktor didalamnya. Fungsi ini juga berperan dalam mengelola hubungan ketiga fungsi lainnya dalam skema AGIL. Misalnya peraturan-peraturan yang tertera di pihak Dinas Sosial yang merupakan tata tertib maupun hal yang berkaitan dengan norma kesejahteraan para PMKS sebagai output dari hasil tersebut (Integration).

*Keempat, Latency* yaitu fungsi yang dimiliki suatu sistem untuk memperlengkap, memelihara dan memperbaiki, pada tingkat individu maupun tingkat kultural. Contohnya bila dalam suatu lembaga memiliki kemampuan mengawasi kelembagaan dengan baik maka lembaga tersebut akan baik. Dalam hal ini Dinas Sosial ataupun di divisi UPT Pusat Kesejahteraan Sosialnya, jika pemeliharaan Dinas Sosial tersebut tidak baik dan proses dalam mensejahterakan

PMKS tidak baik, maka lembaga tersebut tidak akan baik pula sebaliknya, jika pemeliharaan Dinas Sosial baik dan dalam proses mensejahterakan PMKS nya baik, maka keadaan Dinas Sosial tersebut pasti akan baik dan akan terciptanya kesejahteraan para PMKS juga.

**Gambar 1.1**

**Struktur Sistem Tindakan Umum**



Pada skema sistem tindakan tersebut, dapat dilihat bahwa Parsons menekankan pada hirarki yang jelas. Pada tingkatan yang paling rendah yaitu pada lingkungan organis, sampai pada tingkat yang paling tinggi, realitas terakhir dan pada tingkatan integrasi menurut sistem Parsons terjadi atas dua cara.

*Pertama*, masing-masing tingkat yang paling rendah menyediakan kondisi atau kekuatan yang diperlakukan untuk kegiatan yang lebih tinggi. *Kedua*, tingkat yang lebih tinggi mengendalikan tingkat yang berada di bawahnya.

Berdasarkan analisis kerangka pemikiran di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlantar akan lebih terjamin kehidupannya jika ada suatu lembaga yang bertanggung jawab yakni Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Divisi Kerja UPT Pusat Kesejahteraan Sosial Kota Bandung. Dinas tersebut mempunyai peran dan fungsi untuk mensejahterakan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Untuk memudahkan pemahaman mengenai Peran Pekerja Sosial Dalam Memberi Motivasi terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), penulis menggambarkan skema kerangka pemikiran seperti dibawah ini:

